

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dira Shafira Humairoh Batubara¹, Porkas Sojuangon Lubis^{2✉}, Elwardi Hasibuan³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

e-mail: porkas.mm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Sampel pada penelitian ini berjumlah 13 orang. Seluruh instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas, reabilitas, dan normalitas adalah sah, *valid* dan *reliable*. Dari hasil uji regresi menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja akan tetapi kurang signifikan, hal ini terlihat dari hasil pada uji t berdasarkan nilai t hitung adalah 2.110. Karena nilai t tabel < t hitung ($1,796 < 2.110$). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak signifikan dan H_a diterima (tidak signifikan), maka anggaran berbasis kinerja berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas. Dengan kata lain pelaksanaan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh sebesar 28,8% terhadap akuntabilitas kinerja, sisanya 71,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Akuntansi Sektor Publik, Anggaran Berbasis Kinerja.*

Abstract

This study aims to determine the effect of performance-based budget implementation on performance accountability in the Forestry Service of North Sumatra province. The sample in this study amounted to 13 people. All research instruments consisting of validity, reliability, and normality tests are valid, valid and reliable. From the results of the regression test showed that there is a positive relationship between the implementation of performance-based budget to performance accountability but less significant, it can be seen from the results of the t test based on the calculated t value is 2.110. Because the value of T table < t count ($1,796 < 2,110$). So it can be concluded that H_0 is rejected significantly and H_a is accepted (not significant), then the performance-based budget has no significant effect on accountability. In other words, performance-based budget implementation has an effect of 28.8% on performance accountability, the remaining 71.2% is explained or influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: *Public Sector Accounting, Performance-Based Budget.*

PENDAHULUAN

Penganggaran pada sektor publik merupakan suatu hal yang semakin meningkat pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Segala informasi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran haruslah diketahui oleh publik untuk didiskusikan, dikritik, diawasi dan dievaluasi agar memperoleh masukan dan saran. Oleh karena itu hal inilah yang memerlukan kajian mendalam untuk memperbaiki penganggaran pada sektor publik.

Seiring dengan terus berjalan proses otonomi daerah, maka diperlukanlah perubahan-perubahan di berbagai bidang agar dapat mendukung reformasi pada bidang keuangan pemerintah. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik serta pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penyusunan anggaran sektor publik tergolong kedalam proses penentuan jumlah alokasi dana pada tiap-tiap program serta aktivitas satuan moneter.

Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan

urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat Mardiasmo (2009:56).

Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah telah melakukan berbagai perubahan penting dan mendasar dengan maksud untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada serta upaya untuk mengkomunikasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat.

Maka dari itu lahirnya konsep New Publik Manajemen (NPM) pada tahun 1980-an memiliki kaitan yang sangat erat dengan munculnya reformasi di bidang manajemen dan akuntansi keuangan sektor pemerintah, NPM merupakan praktik-praktik manajemen yang menekankan pada privatisasi, komersialisasi, desentralisasi, dan orientasi pada output diadopsi dari praktik-praktik di sektor swasta ke entitas sektor publik yang memberikan pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam pelayanan serta meningkatkan kendali terhadap operasi sektor publik.

Bentuk dari reformasi sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) adalah sistem yang saat ini sedang berkembang pesat dan ramai digunakan oleh negara-negara maju di dunia sebagai pengganti dari sistem penyusunan anggaran tradisional yang lalu yaitu sistem Line Item Budgeting.

Performance based budgeting berbeda dari pendekatan tradisional karena berfokus dengan hasil dari pengeluaran yang dilakukan, bukan dengan jumlah yang dikeluarkan. Performance based budgeting merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2003:3) "Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic."

Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, inisiatif penerapan ABK ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (PP 105/2000) yang memberikan amanat kepada semua lapisan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengimplementasikan ABK. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 8 peraturan tersebut yang dengan tegas menyebutkan bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disusun dengan pendekatan kinerja. Selanjutnya, terbit pula Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) yang mengatur perihal pengelolaan keuangan (penganggaran dan akuntansi) untuk pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. UU ini juga merupakan aturan yang terkait dengan tahapan penganggaran mulai dari penyusunan hingga realisasinya, prinsip-prinsip anggaran dan pengelolaan keuangan, sistem pengelolaan keuangan terkini (akuntansi berbasis akrual, ABK dan kerangka pengeluaran jangka menengah), pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Bawono 2015).

Anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kehutanan Sumatera Utara memberikan peluang untuk dilakukannya evaluasi kinerja secara reguler yang akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Untuk dapat Menyusun anggaran berbasis kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara haruslah memiliki perencanaan strategi. Perencanaan strategis disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara akan dapat mengukur kinerja keuangannya. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kerja pemerintah adalah aspek keuangan berupa anggaran berbasis kinerja. Semua organisasi publik, institusi negara baik pemerintah pusat maupun daerah yang di biayai dari dana publik termasuk diantaranya kementerian negara/lembaga yang

merupakan perangkat pemerintah pusat. Maka perangkat pemerintah memiliki satuan kerja yang terdapat di bawahnya. Masing-masing unit satuan kerja mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui kementerian negara/lembaga. berikutnya satuan kerja dapat mengelola pendanaan tersebut secara desentralisasi bersama dengan unit-unit kerja. Dikarenakan dana yang diberikan kepada satuan kerja adalah dana yang berasal dari pemerintah, maka setiap satuan kerja harus memaknai dan mempertanggungjawabkannya secara transparan, akuntabel, efektif serta efisien. Dalam penyusunan akuntabilitas.

Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Sumatera Utara menggunakan prinsip publik yang merupakan suatu ukuran dalam memperlihatkan seberapa besar tingkat sesuai penyelenggaraan pelayanan dengan mengukur nilai terhadap norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang memiliki kepentingan dengan pelayanan tersebut. Setelah semua kegiatan dan tahapan selesai dilaksanakan maka langkah berikutnya adalah disusunnya laporan pertanggungjawaban (Akuntabilitas) oleh bendahara, atasan langsung (Sekretaris) serta dibantu oleh staf keuangan.

Penelitian ini berfokus untuk membahas program dan kegiatan akuntabilitas yang berhubungan secara langsung dengan tugas utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dengan penyusunan penganggaran pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah anggaran berbasis kinerja yang menggunakan perencanaan kinerja tahunan secara integrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara".

METODE

Menurut Sugiyono (2012:61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah ± 647 orang.

Menurut Ulber Silalahi (2009:254), "Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumbu data dan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan demikian maka peneliti menetapkan sampel pada substansi bagian keuangan, yang berjumlah 13 orang.

Dalam proses mengelola data pada penelitian, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan melihat aspek-aspek pada objek penelitian.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Maka data yang dikumpulkan sebagai bahan penulisan ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap sumber asli. Data primer di dapat melalui cara pemberian kuisioner kepada individual atau kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pada penelitian ini diolah untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Yang di analisis menggunakan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari: Pengujian Validitas, Reabilitas dan Normalitas, Analisis Deskriptif, Regresi Linier Sederhana, Uji Hipotesis: Uji Determinasi (R^2), Uji T.

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur pernyataan-pernyataan yang ada pada kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 13 orang responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 25 pertanyaan.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel X

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X01	56.85	31.641	.569	.899
X02	57.00	31.167	.621	.897
X03	56.69	30.897	.819	.892
X04	57.00	29.167	.643	.897
X05	56.92	28.910	.736	.892
X06	57.00	32.167	.288	.914
X07	57.23	31.192	.590	.898
X08	57.08	32.077	.569	.899
X09	56.85	32.141	.756	.896
X10	56.85	32.141	.756	.896
X11	56.77	31.026	.877	.891
X12	56.92	30.910	.587	.898
X13	56.77	32.026	.661	.897
X14	57.00	30.833	.531	.901
X15	57.08	30.744	.496	.903

Sumber data : Hasil perhitungan data SPSS versi 29.01.0

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Y

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y01	36.00	11.167	.657	.776
Y02	36.00	11.833	.303	.812
Y03	36.15	10.974	.403	.804
Y04	36.08	10.744	.503	.789
Y05	36.08	10.577	.710	.766
Y06	36.15	10.974	.721	.770
Y07	36.08	11.410	.470	.793
Y08	36.00	12.000	.263	.816
Y09	36.00	11.500	.548	.786
Y10	36.15	11.141	.474	.792

Sumber data : Hasil perhitungan data SPSS versi 29.01.0

Corrected item total correlation merupakan r hitung yang akan di bandingkan dengan r tabel agar dapat mengetahui validitas pada setiap butir pertanyaan. Dengan membandingkan r hitung dan r tabel sebesar 0,284 maka kesimpulan yang diperoleh adalah semua pernyataan dinyatakan valid karena semua item r hitung lebih besar dari r table.

Demikian juga dalam hal variabel Y aktivitas pengendalian internal di mana seluruh skor item pertanyaan yang diajukan, seluruhnya berada di atas r tabel. dengan skor total item lebih besar dari r tabel sebesar 0,284, maka seluruh butir pertanyaan adalah valid.

Uji reabilitas ikutip dari Dwi Priatno (2009:26), Reabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Karena nilai yang diperoleh dari 0,6 maka hasil yang diperoleh reliabel.

Tabel 4.7

Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.904	15

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.808	10

Sumber data : Hasil perhitungan data SPSS versi 29.01.0

Uji normalitas penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* yang merupakan bagian dari uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Tabel 4.8

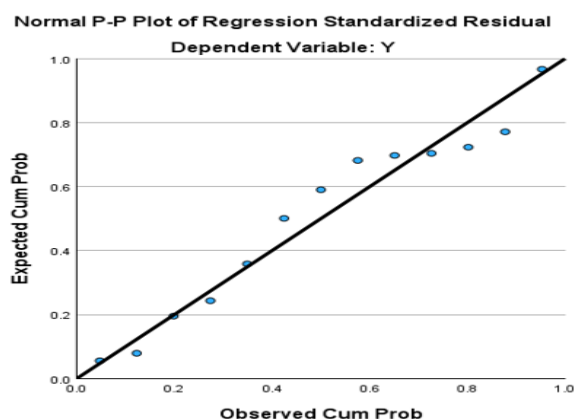
Hasil Uji Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			13
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.10897178
Most Extreme Differences	Absolute		.151
	Positive		.142
	Negative		-.151
Test Statistic			.151
<u>Asymp. Sig. (2-tailed)</u>			.200
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig		.570
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.558
		Upper Bound	.583

Sumber data : Hasil perhitungan data SPSS versi 29.01.0

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.



Gambar 4.3

Output P-P Plot Normalitas

Grafik pada gambar di atas memperkuat kesimpulan bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal, dimana sebaran masih berada di sekitar garis diagonal.

Analisis deskriptif, hal ini dilakukan agar mendapatkan gambaran deskriptif mengenai responden penelitian, khususnya yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner yang dibagikan menggunakan *Skala Likert*.

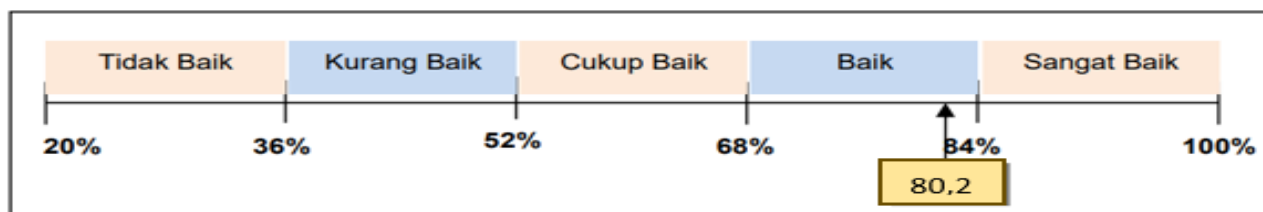
Tabel 4.9

Rekapitulasi Distribusi Tanggapan Responden Mengenai
Anggaran Berbasis Kinerja

<u>Nomor Kuesioner</u>	<u>Alternatif Jawaban</u>					<u>Skor Aktual</u>	<u>Skor Ideal</u>	<u>% Skor Aktual</u>
	<u>SS</u>	<u>S</u>	<u>RR</u>	<u>TS</u>	<u>STS</u>			
1	3	9	1	0	0	52	65	80,0%
2	2	9	2	0	0	52	65	80,0%
3	4	9	0	0	0	52	65	80,0%
4	4	5	4	0	0	52	65	80,0%
5	4	6	3	0	0	53	65	81,5%
6	4	5	4	0	0	52	65	80,0%
7	1	8	4	0	0	49	65	75,3%
8	1	10	2	0	0	51	65	78,4%
9	2	11	0	0	0	54	65	83,0%
10	2	11	0	0	0	54	65	83,0%
11	3	10	0	0	0	50	65	77%
12	3	8	2	0	0	53	65	81,5%
13	3	10	0	0	0	55	65	84,6%
14	3	7	3	0	0	52	65	80,0%
15	3	6	4	0	0	51	65	78,4%
Total						782	975	80,2%

Sumber data : hasil kuesioner diolah 2023

Pada tabel 4.9 dapat dilihat pada persentase total skor tanggapan responden atas ke 21 butir pernyataan variabel anggaran berbasis kinerja sebesar 80,2% dan berada pada interval 68,1% – 84%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja pada substansi bagian keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sudah baik.



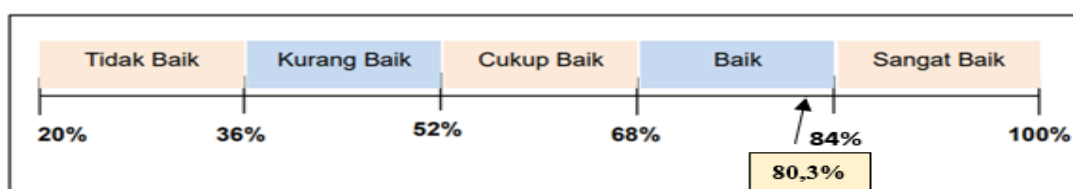
Tabel 4.10

Hasil Jawaban Kuesioner Butir Y 1

Nomor Kuesioner	Alternatif Jawaban					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
	SS	S	RR	TS	STS			
1	2	10	1	0	0	53	65	73,8%
2	3	8	2	0	0	53	65	81,5%
3	3	6	4	0	0	51	65	78,5%
4	3	7	3	0	0	52	65	80,0%
5	2	9	2	0	0	52	65	80,0%
6	1	10	2	0	0	51	65	78,5%
7	2	9	2	0	0	52	65	80,0%
8	3	8	2	0	0	53	65	81,5%
9	2	9	2	0	0	52	65	80,0%
10	2	8	3	0	0	53	65	81,5%
Total						522	650	80,3%

Sumber data : hasil kuesioner diolah 2023

Pada tabel 4.24 dapat dilihat pada persentase total skor tanggapan responden di atas dengan 10 butir pernyataan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 80,3% dan berada pada interval 68,1% – 84%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada Substansi Bagian Keuangan sudah dikatakan baik.



Analisis Regresi Linier Sederhana dilakukan agar dapat mengetahui bentuk hubungan fungsional antara anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 29.01.0 for windows, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.776	7.608		3.173	.009
Anggaran Berbasis Kinerja	.253	.126	.537	2.110	.059

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka rumus persamaan regresi linier sederhana adalah:
 $Y = 24,776 + 0,253X$

Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi anggaran berbasis kinerja (X) 0,253 memiliki tanda positif yang berarti semakin baik pelaksanaan anggaran berbasis kinerja akan membuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkat. Kemudian nilai konstanta juga memiliki tanda positif sebesar 24,776 menunjukkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah apabila tidak dilaksanakan anggaran berbasis kinerja.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.537 ^a	.288	.223	3.247

Sumber data : Hasil perhitungan data SPSS versi 29.01.0

- a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengelolaan data koefisien determinasi (R^2) = 0.288, Dengan kata lain pelaksanaan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh sebesar 28,8% terhadap akuntabilitas kinerja, sisanya 71,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji parsial

Ini dilakukan untuk membuktikan apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka dilakukan pengujian dengan hipotesis, kriteria: 1). Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, 2). Jika nilai absolut $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (0,05), maka H_0 diterima (tidak signifikan) T table pada signifikasi 0,05, dengan perhitungan $df = n - k$ atau $13 - 2 = 11$ yaitu 1,796. Dari hasil uji *out put* pada uji t tes berdasarkan nilai t hitung adalah 2.110. Karena nilai t tabel < t hitung ($1,796 < 2.110$) dan tidak signifikan $> 0,05$ ($0,59 > 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak signifikansi dan H_a diterima (tidak signifikan), maka anggaran berbasis kinerja berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mengolah hasil kuesioner dan telah menggunakan beberapa pengujian melalui software SPSS versi 29.01.0 maka di dapatkan

kesimpulan sebagai berikut: 1). Bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa 0.288, Dengan kata lain pelaksanaan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh sebesar 28,8% terhadap akuntabilitas kinerja, sisanya 71,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, 2). Koefisien regresi anggaran berbasis kinerja (X) 0,253 memiliki tanda positif yang berarti semakin baik pelaksanaan anggaran berbasis kinerja akan membuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkat. Kemudian nilai konstanta juga memiliki tanda positif sebesar 24,776 menunjukkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah apabila tidak dilaksanakan anggaran berbasis kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran. Jakarta : Detail Rekod. Dedi Nordiawan Dkk, 2007. Akuntansi Pemerintah.
- Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Bawono, A. D. B. (2015). The Role of Performance Based Budgeting in the Indonesian Public Sector, Department of Accounting and Corporate Governance, Macquarie University, Australia.
- E Hasibuan, 2018. (Jurnal Implementasi Ekonomi dan Bisnis 7 (2), 1927-1951) Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Pada CV. Sentosa Abadi Medan.
- Garrison, Noreen, dan Brewer. 2007. Akuntansi Manajerial. Edisi ke-11.
- Mardiasmo, 2006, (Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1 Mei) Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- M. Munandar. 2007. Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja. Pengawasan Kerja Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE .
- Nafarin, M. 2012. Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan. Jakarta : Salemba.
- Nafarin, M. 2013. Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- P.S Lubis, Z Zulaili, W Wardani, 2022. (Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) Vol. 2, No. 1, 17 Oktober) Pengaruh Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Metode Rasio Pada Pt. Btn Cabang Medan.
- P.S Lubis, 2020. (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU 9 (1), 208-214) Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya dan Penilaian Kinerja Pada UD. Jaya Abadi Wahana Inovasi.
- Priyatno Dwi. 2009. Manajemen Pemasaran, Analisi Data. Uji validitas dan. Reabilitas.
- Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan.
- Setiana dan Yuliani. (2017), Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jawa Timur. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Vol. 1 No. 2, hal 206.
- Simamora, M. M. (2020). Studi Implementasi Penerapan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dairi.
- Yudiastari, R. R. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).